

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

(Studi pada Pemerintah Kota / Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2021)

Faizal Novian Ariefianto, Drs. Atwal Arifin, Ak., M.Si

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, saat ini pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi daerah yang saat ini dimiliki secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 66 data. Data sampel di dapat dari data sekunder atau data yang diambil dari Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2021 yang berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) Data sampel kemudian diuji menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian juga menunjukkan jika Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Bantuan Sosial, namun Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Kata Kunci : Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, PAD, DAU, Belanja Pegawai, Jumlah Penduduk

Abstract

To carry out government activities, currently regional governments are given the rights and authority to regulate the running of regional government by applicable laws. Local governments are expected to be able to utilize and optimize the potential of the region that is currently owned effectively. This research aims to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Employee Expenditures, and Population on Capital Expenditures and Social Assistance Expenditures. The sampling technique in this study used the purposive sampling method and obtained a sample of 66 data. Sample data was obtained from secondary data or data taken from the APBD Realization Report and the GRDP table for districts/cities throughout Central Java Province for the 2020-2021 period which came from the website of the Directorate General of Financial Balance ([http://www.djpk.kemenkeu.go .id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) The sample data was then tested using multiple linear regression analysis with the SPSS 25 program. The research results stated that

Regional Original Income had a positive effect on Capital Expenditures, while General Allocation Funds, Employee Expenditures, and Population Number did not affect Capital Expenditures. The research results also show that Population Number has a positive effect on Social Assistance Expenditures, but Regional Original Income, General Allocation Funds, and Employee Expenditures have no effect on Social Assistance Expenditures.

Keywords: Capital Expenditure, Social Assistance Expenditure, PAD, DAU, Personnel Expenditure, Total Population

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan, Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur, merencanakan, dan membuat program serta kebijakan pada daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan.

Dengan adanya otonomi daerah, membuat sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan sentralisasi adalah model pemerintahan yang memusatkan semua proses pengambilan keputusan politik, ekonomi dan sosial di satu tempat, yaitu pemerintah pusat. Saat ini, negara yang masih menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi adalah Tiongkok dan Korea Utara, yang menempatkan semua kekuasaan di pemerintahan pusat. Lain halnya dengan desentralisasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan negara kepada daerah otonom menurut asas otonomi yang secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan negara dalam suatu sistem negara kesatuan (Fajri, 2022; Qothrunnada, 2021). Tujuan adanya penerapan desentralisasi adalah untuk merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah, memaksimalkan kondisi sosial ekonomi daerah serta sebagai wujud demokrasi pemerintahan daerah (Isabela, 2022).

Indonesia saat ini sedang menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan meluas yang pernah ada dalam sejarah sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto yang sentralistik dan otoriter. Pendapat lain mengatakan bahwa desentralisasi sebenarnya

adalah sebuah istilah organisasi yang didefinisikan secara sederhana sebagai devolusi kekuasaan/penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena desentralisasi saat ini menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber daya (aset, orang, dll) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi adalah adanya keinginan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada mereka yang merasakan dampaknya secara langsung pengaruh program dan layanan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan publik dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat local untuk memenuhi tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah di tingkat daerah dan nasional dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan sosial ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal (Nuradhawati, 2019).

Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengelola kekayaan daerah dan penggunaan belanja daerahnya masing-masing. Salah satu belanja yang dilakukan pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk membangun aset tetap. Tujuan pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat mendorong investor untuk berinvestasi dan masyarakat dapat dengan nyaman melakukan aktivitas sehari-hari serta dapat meningkatkan tingkat produktivitas. Belanja daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain PAD, kontribusi pajak daerah, retribusi pajak, bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi daerah (Asih & Irawan, 2018).

Menurut Asih dan Irawan (2018) Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan potensi aliran pendapatan untuk dapat meningkatkan PAD. PAD merupakan pendapatan utama suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari PAD yang sah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Terkait pendapatan utama daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa PAD 20 merupakan batas minimum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika PAD dibawah 20%, maka daerah akan kehilangan kredibilitasnya sebagai satuan yang mandiri. PAD inilah yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Pengertian Belanja menurut PSAP No.2 didefinisikan sebagai "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo

Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja menurut jenis belanja dimana kegiatan itu dilakukan.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi semua pembiayaan lokal, setiap daerah harus menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan biaya dan sumber daya manusia yang baik, pembangunan akan berjalan lancar. Kabupaten dan daerah perkotaan dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang relevan. Berbagai pengalihan kewenangan dalam rangka desentralisasi tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Tuasikal (dalam Asih & Irawan, 2020) yang menjelaskan hasil dalam risetnya bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan oleh besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*), dan DAU digunakan untuk menutup kesenjangan yang disebabkan oleh permintaan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri yang ditetapkan oleh APBN (Ferdiansyah, Deviyanti & Pattisahusiwa, 2018).

Banyak Pemerintah Daerah yang belum efektif dalam mengalokasikan anggarannya. Sebagian besar anggaran daerahnya dibelanjakan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu sendiri merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran anggaran untuk porsi belanja modal berkurang. Rata-rata belanja modal pemerintah daerah hanya 19%. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih banyak Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan belanja pegawai daripada belanja modal. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena belanja modal dalam APBD kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi di Indonesia (Reily, 2018). APBD yang banyak digunakan untuk belanja pegawai dinilai tidak efektif dan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Besarnya alokasi belanja pegawai tersebut tidak sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Persoalan tersebut cukup umum terjadi hamper diseluruh daerah-daerah di Indonesia. (Deny, Ada penelitian yang memiliki sudut pandang dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Ilham (2020) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder atau data yang diambil dari Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah. Sugiyono (2010) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Populasi dalam penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dipilih karena salah satu provinsi pusat yang memiliki tingkat pertumbuhan baik. Adapun provinsi jawa tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Sehingga di dapatkan jumlah sampel 70 data dari 2 periode tahun penelitian 2020-2021.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diambil dari Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah

periode 2020-2021 yang berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) dan website BPK (<http://www.bpk.go.id>).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dapat ditemukan beberapa bukti empiris terkait pengaruh PAD, DAU, DAK dan Jumlah Penduduk terhadap belanja modal dan belanja bantuan sosial.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal seluruh kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat dikatakan jika pendapatan asli daerah merupakan sumber utama yang dimiliki suatu daerah, dimana semakin besar pendapatan suatu daerah maka daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk pendistribusian untuk kebutuhan masyarakat guna pembangunan infrastruktur serta pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) dimana pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,692 > 0,05$. Sesuai kondisi di lapangan dimana di beberapa daerah kabupaten dipulau jawa masih terdapat pembangunan infrastruktur yang belum merata dan pelayanan publiknya yang belum tersedia dengan baik. Sesuai dengan konsep jika pemanfaatan dana alokasi umum secara efektif dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Kondisi ini menjelaskan bahwa kemandirian daerah tidak mengalami peningkatan, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) dimana tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,511 > 0,05$. Dapat disimpulkan jika belanja pegawai bukan menjadi salah satu faktor penentu alokasi belanja modal pemerintah daerah. Dalam penganggaran

belanja pegawai pemerintah daerah mempertimbangkan banyaknya jumlah pegawai di pemerintahan tersebut. Semakin besar jumlah pegawai maka akan semakin besar anggaran belanja pegawai yang dikeluarkan dan begitu pula sebaliknya.. Sumber utama pengalokasian belanja modal adalah dana alokasi khusus dimana dana alokasi khusus ini adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenangan daerah akan tetapi sesuai dengan prioritas nasional. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyawati (2021) dimana belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Modal

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel jumlah penduduk (JP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dapat diketahui jika jumlah penduduk merupakan salah satu komponen kebutuhan daerah, jika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka belanja daerah yang dikeluarkan harus lebih banyak. Bagi pemerintah daerah jumlah penduduk yang banyak merupakan aset penting untuk pembangunan sepanjang penduduk daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilannya dan dalam peningkatan produksi nasional. Pada sisi lain jumlah penduduk yang banyak dapat juga menjadi beban pembangunan apabila kualitas sumber daya manusia rendah dengan tingkat produktivitas yang rendah akan mempengaruhi struktur belanja daerah. Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan sosial dan tidak berorientasi pada modal dan belanja pembangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) dimana jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,885 > 0,05$. Tingkat pendapatan asli daerah umumnya berbeda-beda hal tersebut di karenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah wisatawan, belanja modal dan jumlah hotel yang dimiliki setiap daerah. Semakin tinggi PAD yang didapatkan oleh suatu daerah maka Belanja Sosial yang dikeluarkan pemerintah juga akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah PAD maka Belanja Bantuan Sosial yang dikeluarkan

pemerintah semakin sedikit (Puput, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) dimana Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

6. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,235 > 0,05$. Dana alokasi umum yang diterima suatu daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang paling penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mokorimban (2020) dimana dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

7. Pengaruh Belanja Pegawai (BP) terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel dana Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,084 > 0,05$. Belanja pegawai bukan faktor yang mempengaruhi belanja bantuan sosial. Anggaran yang digunakan untuk alokasi belanja bantuan sosial berbeda dengan anggaran belanja pegawai. Sumber utama untuk alokasi belanja pegawai adalah dana alokasi umum karena besar kecilnya dana alokasi umum suatu pemerintah daerah ditentukan oleh celah fiskal dan alokasi dasar dimana alokasi dasar tersebut dihitung dari jumlah banyaknya pegawai di pemerintah daerah. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyawati (2021) dimana belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

8. Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil uji analisis data pada tabel 4.14 dapat disimpulkan jika variabel jumlah penduduk (JP) berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pada kabupaten dipulau jawa dimana nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Tingkat kemampuan belanja penduduk di setiap daerah berbeda-beda, dimana semakin banyak penduduk yang memiliki tingkat kemampuan belanja dibawah rata-rata hal tersebut akan menyebabkan tingkat belanja bantuan sosial lebih besar. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Zulkipli (2021) dimana jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hipotesis 1 diterima dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- 2) Hipotesis 2 ditolak karena nilai signifikansi $0,692 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- 3) Hipotesis 3 ditolak karena nilai signifikansi $0,511 > 0,05$, dengan kata lain dapat disimpulkan jika Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- 4) Hipotesis 4 diterima dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- 5) Hipotesis 5 ditolak, karena nilai signifikansi $0,885 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.
- 6) Hipotesis 6 ditolak karena nilai signifikansi $0,235 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.
- 7) Hipotesis 7 ditolak karena nilai signifikansi $0,084 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.
- 8) Hipotesis 8 diterima dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan jika jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Belanja Bantuan Sosial (Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017). 1-12. BPS Pusat dalam <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Fauzi, T., Darwanis, & Abdulla, S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Alokasi Umum, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 2 Juli 2 Hal 76-92.
- Gorahe, I. M., Masinambow, V., & Engka, D. (2012). Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara. 1-12.
- Kurniati, P. T. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Periode Tahun 2010-2014). 1-10.

- Mokurimban, E. Y., Engka, D. S., & Rotinsulu, D. C. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol 1, No 4, Hal 19-35.
- Permadani, F. E., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2018). Pengaruh Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, Vol 2, No 3, 849-864.
- Realisasi APBD Tahun 2019-2020 dalam: www.djpk.depkeu.go.id
- Sari, P., & Ningsih, N. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui Pad,Dau, Dan Dak Sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, Vol 12.No 2, 99-112.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019, Halaman 1-9.
- Sulistiyawati, A. I., & Purwanti, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol. 11 No. 1, 48- 67.
- Wibisono, N., Purnomo, H., & Rahaju, M. E. (2021). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dan Silpa Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Bakorwil Madiun. *Jamer : Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi*, Vol 2 No 1, 6-11.
- Zais, G. M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. 140- 147.
- Zulkipli, Hamzah, N., & Zakaria, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 4, No 3, 562-572.

-TERAKREDITASI A-